

**EVALUASI PENYALURAN PINJAMAN PADA PROGRAM KEMITRAAN DAN  
BINA LINGKUNGAN PT ASURANSI KREDIT  
INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG  
YOGYAKARTA**

**Khairunisa Dewi Anggraini**  
*Khairunisadewi164@gmail.com*

**Universitas Teknologi Yogyakarta**

**ABSTRACT**

*The CSR program has started to emerge in Indonesia along with the law no. 40 of 2007 about incorporated company and the law no.25 of 2007 about capital investment. There are stated-owned enterprises (BUMN) which have problems in running Partnership and Community Development Program (PKBL), however the solution of these conditions is not by handing over all Partnership and Community Development Program (PKBL) funds to another party that is considered to be expert, but by improving the quality of the entire of state-owned enterprises (BUMN) in order to make them run properly and in accordance with the prevailing regulation and social responsibility as corporate culture and one of the bases of competitive advantage. The research is conducted in PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta which is located on Jalan Tamansiswa No 24 Mergangsan Yogyakarta; qualitative method is used as the research method and the data is the primary and secondary data. The data analysis is qualitative method which is explained in a descriptive way. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) KC Yogyakarta in 2015-2016 can be stated effective in the implementation of CSR program since the score which has been obtained for 2 years is 3 scores with its percentage in 2015 is 97,05% and in 2016 is 82,32%. Its collectability in 2015 is 47,46% and in 2016 is 54,83%.. It can be concluded from the above discussion that social responsibility report can be used as the implementation parameter of CSR activities which have been done by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) KC Yogyakarta as a part of its social responsibility to the community around the company, the use of funds for CSR program which has been done by PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) KC Yogyakarta can be stated effective according to PER-10/MBU/2014 and has in accordance with public accountability.*

**ABSTRAK**

Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Memang banyak BUMN bermasalah dalam menjalankan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), namun jalan keluar dari kondisi ini bukanlah menyerahkan begitu saja seluruh dana PKBL ke berbagai pihak lain yang dianggap ahli, melainkan meningkatkan kualitas seluruh BUMN agar bisa menjalankannya dengan benar, sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan menjadikan tanggung jawab sosial sebagai budaya perusahaan dan salah satu dasar keunggulan bersaing. Objek penelitian ini dilakukan di PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta yang terletak di Jalan Tamansiswa nomor 24 Mergangsan Yogyakarta, dan

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan metode kualitatif yang dijelaskan dengan cara deskriptif. Pada tahun 2015-2016 PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) KC Yogyakarta sudah dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaan program CSR, karena skor yang diperoleh untuk 2 tahun tersebut sebesar 3 skor dengan prosentase pada tahun 2015 sebesar 97,05% dan tahun 2016 sebesar 82,32%. Dan kolektibilitas pada tahun 2015 sebesar 47,46% dan pada tahun 2016 sebesar 54,83%. Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Laporan pertanggung jawaban sosial dapat dijadikan parameter pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) KC Yogyakarta sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan, penggunaan dana untuk program CSR yang dilakukan oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) KC Yogyakarta dapat dikatakan efektif menurut PER-10/MBU/2014 dan telah sesuai dengan akuntabilitas publik.